

**PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA  
LURAH DI KECAMATAN BINJAI BARAT  
KOTA BINJAI**

**TESIS**

**Oleh**

**M. GUSTY NUGROHO  
NPM. 211801022**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

**PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA  
LURAH DI KECAMATAN BINJAI BARAT  
KOTA BINJAI**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**Oleh**

**M. GUSTY NUGROHO  
NPM. 211801022**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul : Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Lurah Di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai**

**Nama : M. Gusty Nugroho**

**Npm : 211801022**

**MENYETUJUI**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Pembimbing II**



**Dr. Adam, MAP**

**Ketua Program Studi**  
**Magister Ilmu Administrasi Publik**


**Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP**

**Direktur**


**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 26 April 2024**

---

---

**Nama : M. Gusty Nugroho**

**NPM : 211801022**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si**

**Sekretaris : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Pembimbing II : Dr. Adam, MAP**

**Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

## HALAMAN PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Proposal Tesis ini dengan judul **“PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA LURAH DI KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI”** adalah benar tulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Medan, April 2024



**M. Gusty Nugroho**  
**211801022**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Gusty Nugroho  
NPM : 211801022  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA LURAH DI KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**  
**Pada tanggal :**  
Yang menerima



M. Gusty Nugroho

## ABSTRAK

### PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA LURAH DI KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI

**Nama** : M. Gusty Nugroho  
**NPM** : 211801022  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Adam, MAP

Pada dasarnya peran Camat terhadap kinerja lurah yang melakukan proses pelayanan publik terhadap kegiatan administrasi yang modern. Oleh karena itu peran camat tersebut juga tidak hanya melalui peran yang berpengaruh pada kinerja pegawai, akan tetapi juga berpengaruh terhadap alat-alat pendukung dari proses kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Melalui suatu kebijakan peran yang baik maka diharapkan kinerja pegawai yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran camat dalam meningkatkan kinerja lurah di wilayah kecamatan Binjai Barat serta mengetahui faktor penghambat camat dalam meningkatkan kinerja lurah di wilayah Kecamatan Binjai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di wilayah Binjai Barat dikategorikan baik dengan melaksanakan secara umum meliputi peran aktif, partisipasif dan pasif. Adapun hambatan dalam meningkatkan kinerja lurah yaitu kualitas sumber daya masih kurang karena kebanyakan perangkat kelurahan berpendidikan terakhir sebatas SMA dan SLTP sehingga kurangnya kualitas sumber daya yang tersedia di kelurahan, sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

**Kata Kunci : Peran, Camat, Kinerja, Lurah**

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE DEFENDANT IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF LURAH IN WEST BINJAI DISTRICT, BINJAI CITY**

**Name** : M. Gusty Nugroho  
**NPM** : 211801022  
**Study Program** : Magister Administrasi Publik  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA  
**Supervisor II** : Dr. Adam, MAP

*Basically, the role of the Camat on the performance of the lurah who carry out the public service process for modern administrative activities. Therefore, the role of the camat is also not only through the role that affects employee performance, but also affects the supporting tools of the employee performance process to provide maximum service to the community. Through a good role policy, it is hoped that the performance of employees who are currently considered weak, especially in the field of supervisory control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure and provide good service to the community. This study aims to determine the role of the sub-district head in improving the performance of the sub-district head in the West Binjai sub-district area and to find out the inhibiting factors of the sub-district head in improving the performance of the sub-district head in the West Binjai sub-district area. The results showed that the role of the Camat in improving the performance of the Kelurahan government apparatus in the West Binjai area was categorized as good by carrying out in general including active, participatory and passive roles. The obstacles in improving the performance of the urban village head, namely the quality of resources is still lacking because most urban village officials have the last education limited to high school and junior high school so that the lack of quality resources available in the urban village, facilities and infrastructure supporting government administration operations are still very lacking due to budget constraints, in addition to disrupting the efficiency and effectiveness of work implementation, it also has the potential to reduce the motivation of implementing officials, which ultimately hinders the achievement of goals, tasks and work.*

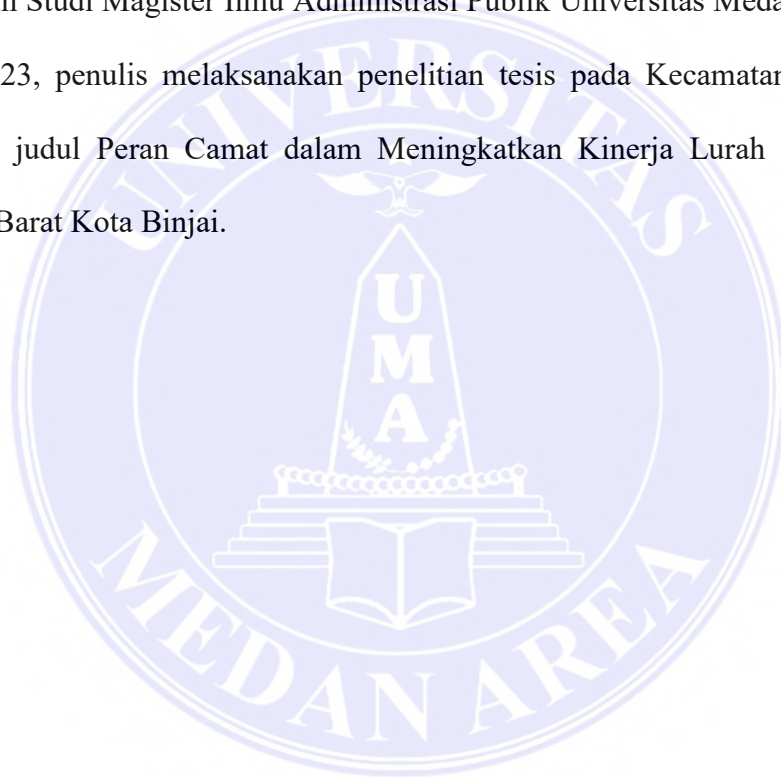
**Keywords:** *Role, Sub-District Head, Performance, Village Head*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Gusty Nugroho dilahirkan di Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 12 Oktober 1997, dari Bapak Supriyono dan Ibu Erniyati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Tahun 2019 penulis lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Bulan Juli 2023, penulis melaksanakan penelitian tesis pada Kecamatan Binjai Barat dengan judul Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Lurah di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan kasih setia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat melengkapai tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magsiter Ilmu Administrasi Publik untuk memperoleh gelar MAP

Pada penulisan tesis ini penulis mengalami banyak kesulitan, seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang dibutuhkan dan keterbatasan kemampuan menulis. Namun, dengan kemauan keras dan tanggungjawab yang dilandasi dengan itikad baik, maka kesulitan tersebut dapat teratasi. Adapun judul yang diajukan dalam penyusunan tesis ini adalah **“Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Lurah di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini dibantu oleh beberapa pihak. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Beby Akbar Masitho, MAP, Selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing dan memberikan arahan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Adam, MAP selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing dan memberikan arahan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Administrasi Publik serta seluruh staf administrasi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan.
8. Seluruh mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021 yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan skripsi.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya dan membalas semua kebaikan mereka. Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Medan, April 2024

Penulis,



M Gusty Nugroho

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Peran.....	9
2.2 Camat .....	13
2.3 Kinerja.....	16
2.4 Konsep Aparatur .....	19
2.5 Konsep Pemerintah .....	21
2.6 Penelitian Terdahulu .....	21
2.7 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Waktu Penelitian.....	26
3.4 Informan Penelitian.....	27

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.6 Teknik Analisa Data.....	30
3.7 Defenisi Konsep dan Operasional.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Binjai Barat.....	34
4.2 Pembahasan.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai organisasi administratif yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan penuh dinamika, maka Kecamatan menghadapi banyak masalah dimana masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis. Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah Kabupaten dan Kota, maka Camat selaku kepala Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda Pemerintahan Kecamatan, disinilah tugas dan kewenangan Camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun, pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja Kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP). Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota, selain melaksanakan tugas tersebut Camat juga bertugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan. Kecamatan di Indonesia masih banyak memberikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimaksud dengan SOP yaitu suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi Pemerintah berdasarkan indikator - indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja,

prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dimana SOP ini mengarah ke dalam proses pelaksanaan administrasi dikantor instansi Pemerintah.

Undang – Undang yang mengatur SOP yaitu Permen PAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Hal ini dapat di lihat dari kinerja pegawainya tidak berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dan sesuai Peraturan yang telah di buat. Termaksud di Kecamatan Binjai Barat, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik pegawai yang berada di kantor Camat Binjai Barat. Dalam proses pembuatan Kartu Keluarga dan e-KTP pelayanan yang diberikan pegawai tidak sesuai yang di harapkan oleh masyarakat, pegawai yang kurang ramah atau tidak memberikan 5S (Senyum, Sapa, Sopan ,Santun, dan Salam), kurangnya disiplin waktu dan efektif dan efesiensi dalam melaksanakan tugas serta minimnya sarana dan prasarana. Permasalahan di atas sangat menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam bentuk pelayanan belum baik dan tidak sesuai dengan Undang – Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Binjai Barat maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian peran Camat dalam proses pengawasan yang berlangsung. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha – usaha yang dilakukan, apakah sesuai dengan program yang telah dibuat atau belum.

Seterusnya Pasal 27 mengatakan Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan. Koordinasi yang

dimaksud ialah koordinasi Camat untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang efektif dan efisien.

Keberhasilan aparat Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah merupakan keberhasilan Camat dimana berperan sebagai pemimpin, maka dari itu dalam pelaksanaan perlu adanya disiplin kerja oleh aparat Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengertian kinerja dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005), mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam suatu Pemerintahan, sumber daya manusia yang tak lain sebagai tenaga kerja adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, Pemerintah dan pembangunan. Kinerja yang optimal bergantung kepada perilaku yang tercermin oleh para pegawai itu sendiri. Perilaku tersebut meliputi sikap dan disiplin pegawai pada pelaksanaan tugas yang dikerjakan. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pemimpin yang menilai kinerja pegawai, yaitu atasan pegawai langsung, dan atasan tak langsung.



Pada dasarnya pengawasan Camat terhadap kinerja lurah yang melakukan proses pelayanan publik terhadap kegiatan administrasi yang modern. Oleh karena itu pengawasan camat tersebut juga tidak hanya melalui pengawasan yang berupa kinerja pegawai, akan tetapi juga pengawasan terhadap alat-alat pendukung dari proses kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik maka diharapkan kinerja pegawai yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Berikut perbandingan jumlah penduduk dan jumlah pegawai dalam setiap kelurahan:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Kelurahan dan Pegawai pada**  
**Kelurahan di Kecamatan Binjai Barat**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pegawai
1	Limau Sundai	7.769 orang	7 orang
2	Limau Mungkur	6.011 orang	8 orang
3	Payaroba	10.419 orang	11 orang
4	Bandar Senembah	6.763 orang	9 orang
5	Sukaramai	8.680 orang	9 orang
6	Sukamaju	8.917 orang	10 orang

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa adanya ketimpangan jumlah penduduk dan jumlah pegawai yang melayani masyarakat dalam setiap kelurahan. Hal ini menyebabkan tugas yang diberikan belum optimal. Data ini juga mendukung observasi awal, yang dilakukan peneliti menemukan bahwa dalam pengadministrasian yang kurang cakap karena sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Hal ini ditunjukkan dari ketika lurah memberikan surat laporan/tugas kepada Camat lalu diproses dalam waktu yang lama, walaupun seluruh pengadministrasian sudah termonitor dalam E-Kelurahan. Dalam beberapa tugas dan program kurangnya koordinasi Camat, Lurah dengan stakeholder. Untuk mendukung dan mempercepat tujuan Camat dalam menjalankan seluruh programnya, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, kenyataan di lapangan bahwa sarana dan prasarana di Kecamatan serta Kelurahan terhambat sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping sarana dan prasarana yang memadai, kemampuan SDM juga menunjang kinerja lurah dalam mencapai tujuan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada Kelurahan di Kecamatan Binjai Timur masih banyak pegawai yang belum kompeten terlihat dari kuantitas dan kualitas kerja yang dihasilkan. Hal ini juga menghambat peran Camat dalam meningkatkan kinerja lurah. Setiap program yang dijalankan Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah juga membutuhkan inovasi dari semua staff yang menjalankannya. Namun dalam hal ini, para staff pegawai masih belum dapat berinovasi terhadap pekerjaan dan program yang berjalan sehingga menghambat kinerja Lurah.

Kecamatan Binjai Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Binjai, yang mempunyai kesamaan fungsi dengan Kecamatan yang lainnya yakni salah satunya pelayanan kepada masyarakat. Dari pengamatan awal pengamatan penulis di Kecamatan Binjai Barat, Kinerja aparat Lurah belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, penulis juga melihat aparat Pemerintah Kecamatan Binjai Barat kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh Pemerintah Kelurahan sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan. Selain dari hal-hal diatas penulis juga melihat pihak Kecamatan tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, Camat yang dilegitimasikan menjalankan Undang-Undang seharusnya membina aparat Kelurahan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. Supervise atau pengarahan serta pengendalian dari pihak Kecamatanpun kepada Kelurahanpun kurang maksimal, Camat jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat walaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat tidak terarah dengan baik.

Maka dari inilah maka diharapkan Camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat Kelurahan apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa

tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan menekankan pada **“Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Lurah di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah di wilayah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai?
2. Apa saja hambatan Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah di wilayah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peran Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah di wilayah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah di wilayah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan kinerja Lurah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan meningkatkan kinerja Lurah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan peran Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peran Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sedangkan menurut Gibson In Vancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana

didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.

- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Menurut Chinoy yang dikutip oleh Soekanto, peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian Peraturan-Peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat (Soekanto, 1992:269)

Menurut Siagian (1993:30) Selain dari hal tersebut diatas, dalam bagian yang lain dikemukakan bahwa peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian Peraturan-Peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat



3. Peranan adalah suatu konsep psikal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

### 2.1.1 Konsep Peran

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut Soekanto (2012:213) adalah sebagai berikut :

- 1) Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

- 2) Ekspektasi Peran

Ekspektasi Peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

- 3) Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik peran ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat suatu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

### 2.1.2 Jenis Peran

Mengenai peranan ini, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012:214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

a. Peran Aktif.

Peran Aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran Partisipasif.

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran Pasif.

Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

## 2.2 Camat

Menurut Bayu Suryaningrat (1981:2) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah

di wilayah Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota. Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurosi bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Camat meliputi 5 bidang kewenangan Pemerintah yaiu:

1. Bidang Pemerintah
2. Bidang pembangunan dan ekonomi
3. Bidang pendidikan dan kesehatan
4. Bidang sosial dan kesejahteraan
5. Bidang pertahanan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat 1 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undang.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di tambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati / Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai Tugas dan wewenang camat baik untuk wewenang yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Di dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

## 2.3 Kinerja

### 2.3.1 Konsep Kinerja

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan *performance*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai berikut :

1. Sesuatu yang di capai
2. Prestasi yang diperlihatkan
3. Kemampuan kerja

Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*Performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.

Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja, Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat di capai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Gomes (2003:143) mengatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Whitmore menjelaskan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang dan juga suatu perbuatan, suatu prestasi suatu keterampilan. Dari semua definisi kinerja seperti di atas maka pada prinsipnya kinerja berkaitan dengan penampilan seseorang dalam suatu pekerjaan berdasarkan ukuran yang berlaku dari pekerjaan bidang tersebut. Penampilan kerja yang optimal dari karyawan akan menghasilkan produk yang meningkat secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan hal yang serius dari pimpinan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya maju tidaknya suatu organisasi

tergantung dari perilaku individu dalam organisasi itu. Perilaku yang diharapkan pimpinan itu adalah perilaku yang meningkatkan kinerja karyawan. Perilaku mencerminkan sikap, keyakinan dan nilai seseorang/individu. Perilaku yang diharapkan oleh pemimpin organisasi adalah perilaku yang mencerminkan sikap, keyakinan dan nilai setiap karyawan yang akan pekerjaannya yang positif, yaitu yang menimbulkan motivasi kerja atau etos kerja.

### 2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini Jones (2002:92) mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk antar lain:

1. Kemampuan pribadi
2. Kemampuan manajer
3. Kesenjangan proses
4. Masalah lingkungan
5. Situasi pribadi
6. Motivasi.

Sementara itu Buchari Zainun (1989:51) mengemukakan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yaitu:

1. Ciri seseorang
2. Lingkungan luar
3. Sikap terhadap profesi pegawai.

Hunt dan Osborn (1982:76) lebih jauh mengungkapkan bahwa pengelolaan kinerja akan berdampak terhadap manajemen organisasi secara umum. Dari uraian diatas jelaslah bahwa kinerja pegawai di kelola terutama untuk mencapai produktivitas dan efektivitas dalam rangka merancang bangun kesuksesan baik secara individu maupun organisasi.

## 2.4 Konsep Aparatur

Secara Etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri. Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat Pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur sebagaimana adalah:

### 1. Aparatur Negara

Aparatur negara adalah keseluruhan pejabat dan lembaga negara serta Pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan Pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan Bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### 2. Aparatur Pemerintah



Aparatur Pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang ada di bawah Presiden seperti Departemen, Lembaga, Pemerintahan dan Departemen serta Sekretariat Departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara.

### 3. Aparatur Perekonomian Negara

Aparatur perekonomian negara adalah keseluruhan Bank Pemerintah, lembaga perkreditan, lembaga keuangan, pasar uang dan modal serta perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah.

Melihat luasnya pengertian dan adanya macam-macam istilah terhadap aparatur ini maka dalam tulisan ini dipakai istilah aparatur Pemerintah. Dalam tulisan ini maka aparatur Pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Abdi masyarakat itu ialah untuk melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan sebagai abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aparatur Pemerintah adalah :

- a. Bersih
- b. Berwibawa
- c. Bermental baik
- d. Mempunyai kemampuan profesional yang tinggi
- e.

## 2.5 Konsep Pemerintah

Pemerintahan dan Pemerintah mempunyai arti sempit dan luas, Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan Negara, yang kalau mengikuti pembidangan menurut Montesquieu, Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan Negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja. Inu Kencana Syafiie (1994 : 11), memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan Pemerintah
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dri badan yang memerintah tersebut.

Menurut W. S. Syare dalam Inu Kencana Syafiie (2005:5) mengemukakan maksudnya Pemerintah dalam definsi terbaiknya adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan menjalankan kekuasaannya. Kesimpulannya adalah pemerintah di artikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan negara).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rudiah dkk (2018), Hasil penelitian tentang peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan kinerja aparat di kantor Desa Halangan sudah cukup berperan. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi dengan presentasi 46%. Adapun yang menjadi faktor penghambat peran kepala desa dalam memotivasi aparat untuk meningkatkan kinerja yaitu pemimpin sulit mengetahui motivasi kerja setiap bawahan dan pemimpin sulit memberikan perlakuan yang adil bagi setiap bawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian dan Rahmat (2019) Permasalahan pelayanan publik di Pemerintah Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian yang dilakukan Gori dan Simamora (2020), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola dan proses komunikasi yang digunakan adalah pola saluran total yakni memberikan kebebasan untuk menyampaikan informasi baik dari Kepala Desa ataupun perangkat desa begitu juga sebaliknya. Adapun faktor penghambatnya adalah miscommunication yang terjadi antara Kepala Desa dengan perangkat desa dan begitu juga dengan sebaliknya, hambatan semantik dan hambatan fisik.

Penelitian yang dilakukan Laira (2016), Kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, aparat juga kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, selain itu pihak Kecamatan juga tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat lebih jarang memberikan penerangan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan aparat tidak terarah dengan baik.

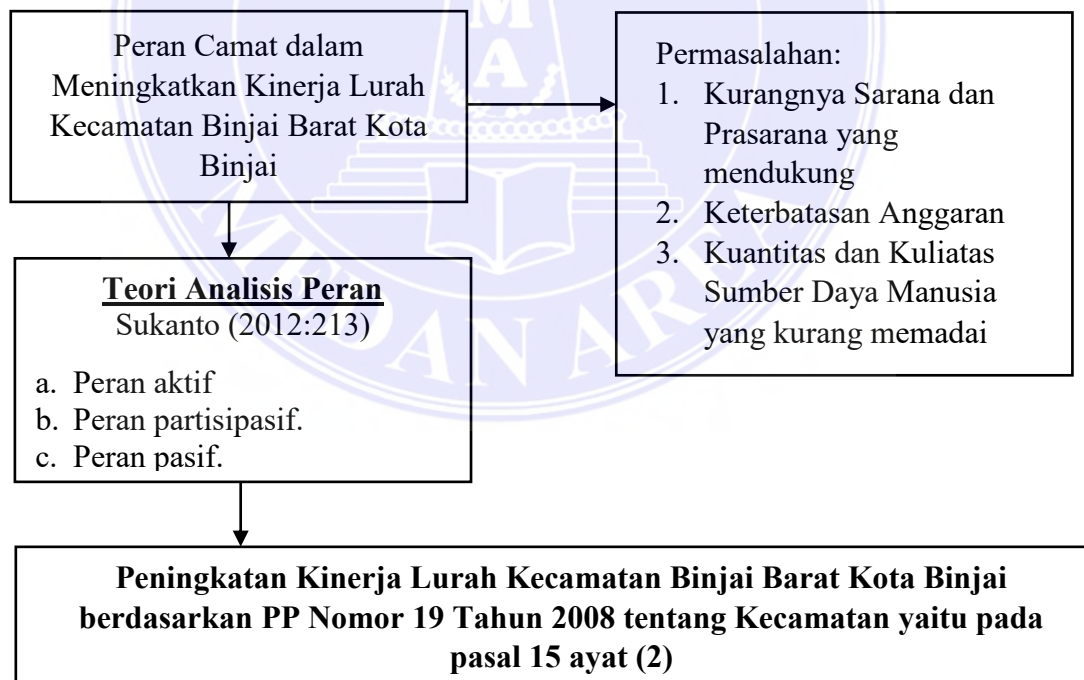
Penelitian yang dilakukan Priansyah (2023) Kesimpulannya bahwa bahwa Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Kantor Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yaitu: Walaupun waktu Camat terbatas tapi Camat berusaha memberikan peranan yang baik bagi Pegawai di Kantor Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan memberikan motivasi bagi pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting dkk (2023) Dari hasil penelitian diperoleh peran Camat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo masih kurang maksimal dikarenakan masih lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo yakni Faktor Kemampuan dan Keterampilan Aparatur meliputi pelaksanaan sumber daya aparatur yang kurang memadai. Faktor Sarana dan Prasarana yang belum memadai seperti kurang diperhatikannya gedung kantor Kecamatan.

Penelitian yang dilakukan Naue dkk (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian bimbingan dari camat kepada Pemerintah Kelurahan Tingkulu, dapat disimpulkan tidak maksimal, Pemerintah Kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak Kecamatan hanya „menunggu bola“ tidak berinisiatif dalam memberikan pembimbingan langsung kepada Pemerintah Kelurahan, serta pelaksanaan supervise tidak jauh beda dengan pemberian bimbingan, Pemerintah tidak melakukan supervise dengan mendatangi kantor Kelurahan dan melakukan pengawasan melekat dengan baik.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka pemikiran dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini atau selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian dekripsi secara garis besar merupakan kegiatan peneliti yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi data yang bersumber dari Kantor Camat Binjai Barat.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran peran Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai. Sedangkan fokus penelitian yaitu Kantor Camat Binjai Barat. Yang beralamat di Jl. Mancang No.5, Limau Mungkur, Kec. Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara, 20743.

### 3.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai dengan selesai.

**Tabel 3. 1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2023								2024			
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Seminar Proposal		■										
3	Pengumpulan Data			■									
4	Analisis Data			■	■	■	■	■	■	■			
5	Seminar Hasil										■	■	
6	Ujian Tesis												■

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut Bungin (2011:50), informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai masalah penelitian. Informan berfungsi untuk membantu menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan bermanfaat bagi bahan analisis. Pemilihan informan pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Informan harus benar-benar melalui pemilihan yang selektif, informan juga harus mengetahui atau sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan melalui bentuk sumber data snowball sampling. Yang diartikan sebagai memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya. Dalam bentuk ini, peneliti cukup mengambil satu orang informan saja dahulu. Kemudian kepada orang pertama ini, tanya lagi orang lain yang mengetahui dan memahami kasus sehubungan dengan informasi yang dijadikan fokus penelitian dalam situasi sosial di daerah/tempat penelitian dan begitulah seterusnya, sampai peneliti yakin bahwa data dan informasi yang dikumpulkan cukup dan data yang didapat setelah diolah dilapangan sejak awal penelitian telah menunjukkan hasil yang sama dan tidak berubah lagi (Yusuf, 2014:371).

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut.



Berdasarkan penjelasan mengenai teknik pengambilan sampel diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Status Informan	Jabatan	Informasi yang Dibutuhkan	Jumlah
1	Informan Utama	Lurah Payaroba, Lurah Bandar Sinembah	Perencanaan, manfaat, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan, sumber daya, strategi, karakteristik rezim yang berkuasa dan tingkat respon pelaksana	2
2	Informan Kunci	Camat	Manfaat, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya, strategi, karakteristik rezim yang berkuasa dan tingkat respon pelaksana	1
3	Informan Tambahan	Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Kepling	Manfaat, perubahan yang diinginkan, pelaksana program dan tingkat respon pelaksana	3

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada berbagai narasumber seperti Camat Binjai Barat Kota Binjai, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Lurah, dan Organisasi/Tokoh

Masyarakat. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui:

1. Observasi, yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono. 2017). Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (chek list) atau daftar isian.
2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Sugioyo. 2017). Instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden/informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Wawancara akan dilakukan dengan informan.
3. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, peran, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2017). Pada dasarnya proses studi dokumentasi

bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang lainnya.

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan-pengumpulan data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literature, internet, serta instansi-instansi terkait seperti Kantor Camat Binjai Barat yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Binjai Barat.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Lurah di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

### **b. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

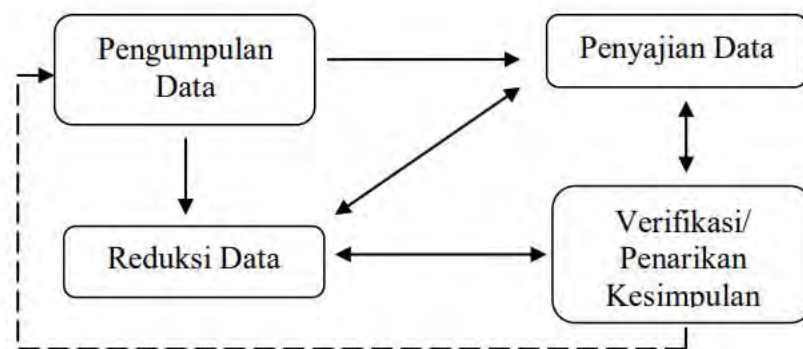
tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada informan yaitu Camat Binjai Barat Kota Binjai, Lurah Payaroba, Lurah Bandar Sinembah, Kasi Pemerintahan Payaroba, dan Kepala Lingkungan.

### c. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 39 yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

#### d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



### Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

#### 3.7 Definisi Konsep dan Operasional

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu (Singarimbun dan Efendy, 1995:33). Operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya (Chourmain, 2008:36).

##### 3.7.1 Konsep

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota.
2. Aparatur adalah alat negara, aparat Pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

3. Pemerintah sekelompok orang yang bekerja sama dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan negara).

### 3.7.2 Operasional

Pada penelitian ini defenisi operasional mengacu kepada teori Soerjono Soekanto (2014:214), dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Peran dalam Aktif, adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kontribusinya membuat kebijakan berupa tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya) terhadap suatu tujuan dari organisasi.
2. Peran dalam Partisipasif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Hal tersebut dapat diukur dari keikut sertaannya dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi.
3. Peran dalam Pasif, suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu secara langsung. Hal tersebut dapat diukur dari keterlibatan fungsi-fungsi lainnya dalam organisasi sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peraturan Daerah Nomor: 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan sebagian urusan otonomi daerah dan ayat (2) huruf (f dan g) Camat bertugas membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Peran Camat dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dapat kita lihat dalam pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat terkait dengan peran Camat dalam proses pemerintahan di wilayah kecamatan, dimana Camat memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pembinaan terhadap aparatur desa, administrasi desa, pembuatan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa dan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Binjai Barat, dapat disimpulkan:

1. Peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di Kecamatan Binjai Barat sudah baik, dimana Camat sudah melakukan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan di Kecamatan Binjai Barat. Pelaksanaan tugas Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kelurahan di wilayah Kecamatan Binjai Barat terdapat pada peran aktif, peran partisipasif dan peran pasif. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kelurahan terlepas pada peran Camat.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Camat Binjai Barat dalam meningkatkan kinerja aparatur kelurahan mangalami hambatan-hambatan yaitu sebagai berikut:
  - a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di kelurahan untuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat yang terkendala dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kelurahan.
  - b. Keterbatasan anggaran yang ada di Kecamatan Binjai Barat sehingga banyak pemenuhan kebutuhan yang tidak baik dan berdampak dalam pelayanan masyarakat di kelurahan yang tidak efektif dan efisien.
  - c. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dimiliki kelurahan pada umumnya masih rendah karena kebanyakan perangkat kelurahan berpendidikan terakhir SMA dan kurang cakap teknologi serta Pendidikan yang tidak selaras dengan jabatan yang diemban sehingga menjadikan sumberdaya tidak professional. Dibutuhkannya diklat /

sosialisasi mengenai bagaimana dalam menjalankan jabatan tersebut namun karena keterbatasan anggaran maka program tersebut belum bisa terealisasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa, Camat harus mempertahankan kualitas peran dalam membina dan memfasilitasi aparatur agar berkinerja maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peneliti dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Camat perlu kedepannya menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa. Parameter penentuan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga akan terjamin peningkatan kualitas dari kinerja pegawai.
2. Camat perlu melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa kedepannya dengan lebih baik dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai. Sehingga anggaran belanja yang disusun menjadi makna yang strategis bagi pegawai.
3. Camat perlu membuat pelatihan dan diklat kepegawaian guna untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menekankan pada ketetapan, ketelitian dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan. Dalam hal evaluasi, Camat dapat memberikan penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*) yang berimbang terhadap aparatur yang berprestasi maupun aparatur yang bermasalah

sehingga dapat membantu dalam memperbaiki kualitas kerja aparatur Pemerintah di Kecamatan serta di Kelurahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Undang – Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014
- Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial. Jakarta. Departemen Ilmu Administrasi FISIP
- Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta. Salemba Empat.
- Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Fredrich, Jenkins dan E. Anderson, James. 2004. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

Gordon dkk. (2016). Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis Dan Partisipasi. Ghalia: Jakarta

Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017. Sosiologi PerKotaan. Bandung : Pustaka setia

Kasiyanto, 2010. Good Governance KePemerintahan Yang Baik. Bandung: Mandar Maju Pers

Sugandi, Suprayogi Yogi. 2011. Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Permen PAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Thoha, Mifta. 2012. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers



### Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Selaku Camat Binjai Barat, apa yang dilakukan Bapak Camat Binjai Barat dalam meminimalisir kendala yang terjadi dalam melayani masyarakat di tiap-tiap kelurahan di Binjai Barat terkait dengan keterbatasan anggaran pada sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat ?
2. Pada awal tahun dilaksanakannya musyawarah kelurahan terkait data terpadu kesejahteraan sosial kepada rakyat yang kurang mampu, pasti juga ada masyarakat kurang mampu yang terkendala dalam memenuhi kelengkapan administrasinya. Bagaimana peran bapak Camat dalam menyelesaikan hal tersebut ?
3. Sebagai Camat di Kecamatan Binjai Barat, Kegiatan rutin apa yang dilakukan Camat dalam meningkatkan kinerja Lurah ?
4. Apakah Camat Binjai Barat menjalankan perannya sebagai Camat sesuai dengan program pemerintah ?
5. Sebagai pimpinan tertinggi di wilayah Kecamatan Binjai Barat, apakah Camat Binjai Barat sering melakukan koordinasi dan evaluasi guna menciptakan pelayanan kepada Masyarakat lebih efektif dan efisien ?
6. Bagaimana peran Camat dalam mengedepankan pelayanan kepada Masyarakat ? dan adakah kendala yang terjadi ?

7. Permasalahan apa yang sering terjadi di Kecamatan Binjai Barat ?
8. Bagaimana peran Camat Binjai Barat dalam partisipatif guna meningkatkan kinerja Lurah di Kecamatan Binjai Barat ?
9. Bagaimana kebijakan yang dilakukan Camat Binjai Barat dalam melayani Masyarakat sesuai dengan tupoksinya ?
10. Apabila terjadi permasalahan krusial mengenai perbatasan tanah di Masyarakat, bagaimakah peran yang dilakukan Camat dalam menghandle masalah tersebut ?
11. Bagaimana peran Camat Binjai Barat dalam mendukung setiap program yang dilakukan pemerintah di wilayah Binjai Barat guna mendukung wilayah Binjai Barat menjadi lebih baik ?
12. Kegiatan kemasyarakatan apa sajakah yang di arahkan oleh Camat guna menciptakan kenyamanan dan ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Barat ? dan apakah Camat juga turut serta dalam kegiatan tersebut ?
13. Salah satu peran pasif Camat ialah turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan pada wilayah tersebut. Apakah salah satu contoh kegiatan tersebut ?
14. Dalam pengoptimalan pelayanan masyarakat Pemerintah Kota Binjai menciptakan satu aplikasi yakni E-kelurahan sebagai inovasi dalam pelayanan. Bagaimana peranan Camat dalam penggunaan aplikasi tersebut serta kendala yang di hadapi ?
15. Stunting menjadi salah satu isu Nasional yang ada di Indonesia. Bagaimana peranan Camat Binjai Barat melakukan Upaya penurunan angka stunting di Kecamatan Binjai Barat ?
16. Guna membantu meningkatkan Pendapatan Daerah, bagaimana kebijakan yang dilakukan camat dalam membantu hal tersebut ?
17. Dalam peranan Camat guna meningkatkan peran Lurah di Kecamatan Binjai Barat, pasti banyak terdapat hambatan atau kendala Camat dalam melakukan peranannya, maka apa sajakah hambatan yang terjadi ?

## Lampiran II : Dokumentasi Penelitian







Foto Dokumentasi 1. Informan Utama, Camat Binjai Barat. Bapak Oscar Arifandi Ginting, S.STP, MM,.

(Sumber : Dokumen Pribadi. Rabu, 17 Januari 2024)

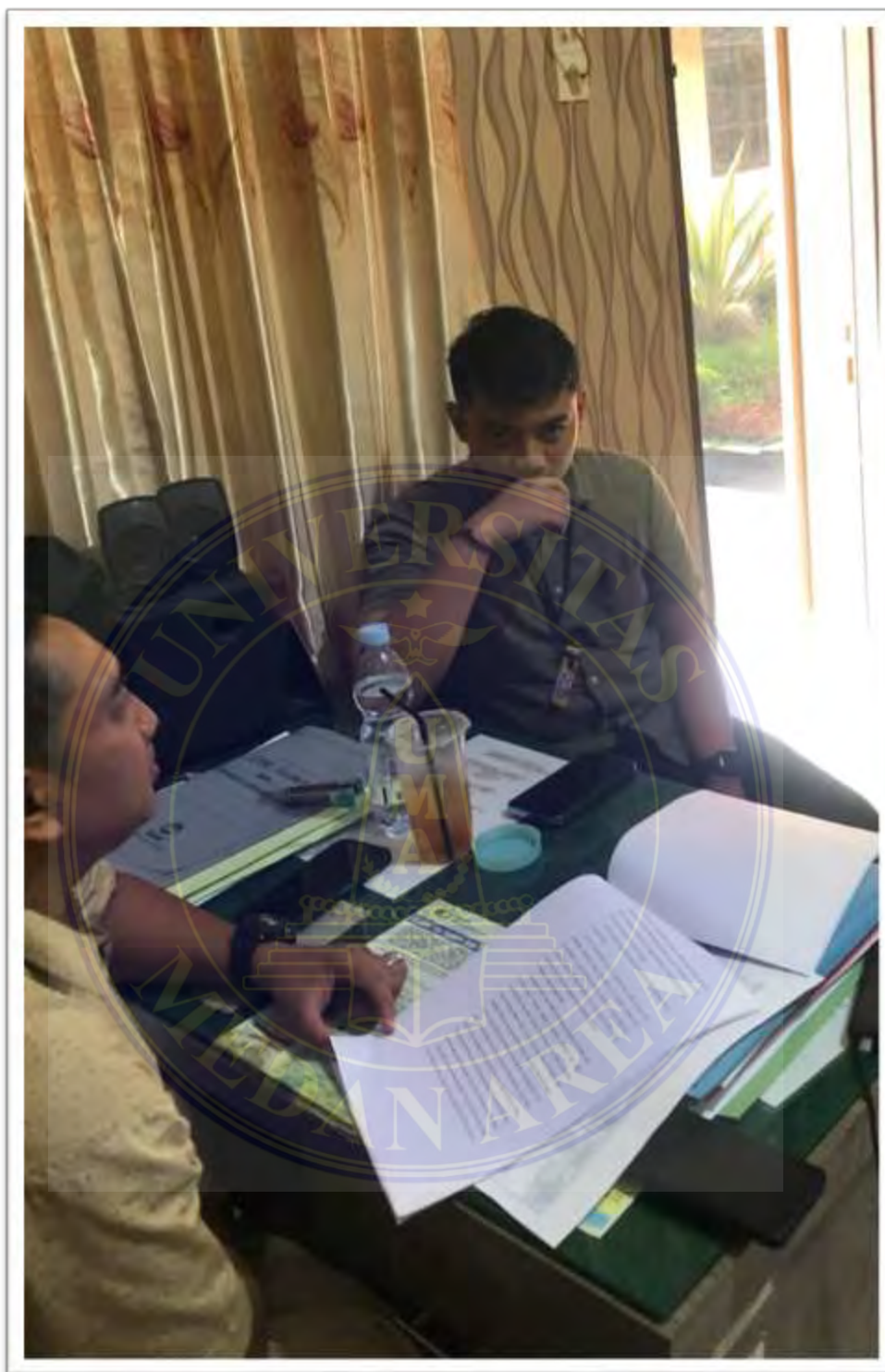


Foto Dokumentasi 2. Informan Tambahan, Sekretaris Camat Binjai Barat. Bapak Bobby Arisandi, S.STP.

(Sumber : Dokumen Pribadi. Jumat, 3 November 2023)



Foto Dokumentasi 3. Informan Tambahan, Kasi Pemerintahan Kec. Binjai Barat.  
Ibu Ike Rahayu, SE.

(Sumber : Dokumen Pribadi. Senin, 13 November 2023)



Foto Dokumentasi 4. Informan Kunci, Lurah Bandar Senembah. Ibu Nurfadhilah  
Mahyuni Siregar, S.STP.

(Sumber : Dokumen Pribadi. Selasa , 23 Oktober 2023)



Foto Dokumentasi 5. Informan Kunci, Lurah Payaroba. Bapak Safwan Siddin, S.STP.

(Sumber : Dokumentasi Pribadi. Rabu, 10 Januari 2024)



Foto Dokumentasi 6. Informan Tambahan, Kepling Lingkungan II Kel. Payaroba.  
Bapak Gimán.

(Sumber : Dokumen Pribadi. Selasa, 9 Januari 2024)



Foto Dokumentasi 7. Camat turut serta dalam pembagian bantuan sembako dari BAZNAS kepada masyarakat

(Sumber : Dokumen Kec. Binjai Barat. Kamis, 5 Oktober 2023)



Foto Dokumentasi 8. Camat Binjai Barat Menghadiri Akreditasi Puskesmas H.A.H Hasan

(Sumber : Dokumen Kec. Binjai Barat. Rabu, 8 November 2023)



Foto Dokumentasi 9. Camat melakukan koordinasi dengan Lurah dan Stakeholder terkait setiap minggu.

(Sumber : Dokumen Pribadi. Minggu, 31 Maret 2024)



Foto Dokumentasi 10. Camat hadir dalam acara Kunjungan Pj. Gubernur Sumatera Utara pada acara Hari Makan Ikan sekaligus peresmian Rumah Pangan yang ada di Kel. Payaroba

(Sumber : Dokumen Kec. Binjai Barat. Kamis, 14 Desember 2023)



Foto Dokumentasi 11. Camat melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan dan berkoordinasi dengan Wali Kota untuk kemajuan wilayah Binjai Barat.

(Sumber : Dokumen Kec. Binjai Barat. Selasa, 30 Januari 2024)



Foto Dokumentasi 12. Camat Binjai Barat juga memberikan respon yang cepat di masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan.

(Sumber : Dokumen Kec. Binjai Barat. Kamis, 18 April 2024)